

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Cetakan Kedua. Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arba, M. 2021. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Burhan,
- Diantha, I.M. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Fajar, M. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta.
- Kertadi, I.K, & Putra, I.D. 2014. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Dalam Hukum Perjanjian ke Dalam Perancangan Kontrak*. Denpasar : Udayanan University Press
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka.
- Muhammad, A.K. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. 2011. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Putra, I.B. 2017. *Hukum Kontrak Internasional Law of Internasuonal Contract Cet ke I*. Bandung : Refika Aditama
- Santoso, U. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komperehensif, Ed. I*. Jakarta : Kencana Penada Media Group.
- Setiawan, I.K.O. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Soekanto, S. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Pres.
- Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi. 2012. *Hukum Agraria*. Jakarta : Sinar Grafika
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. 2016. *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Jakarta: Refika Aditama.

Wulansari, Dewi. 2016. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Cetakan Keempat*, Jakarta :Refika Aditama

Zainuddin, Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

JURNAL

Akbar, M. A. P. 2022. Wanprestasi Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Masuk Dalam Boedel Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 PK/Pdt/2016). *Indonesian Notary*, 4(1). 23

Anggeni, Ni Kadek Ditha & Warocana. Legalitas Jual beli tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayanan*, Vol 6, No. 9.

Baharudin. 2014. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tnah (PPAT) DALAM Proses Jual Beli Tanah. *Jurnal Keadilan Progresif*, 5 (1), hal 89-101

Budjang, C. B. 2018. Jual Beli Tnah yang dilakukan Tanpa Akta PPAT. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 5(1), 89-107.

Djidar, H., & Amrullah, M. S. 2022. Tinjauan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Di Bawah Tangan Sebagai Jaminan Kepemilikan Rumah (Studi Penelitian Pada PT. Imbara Permai Sejahtera). *Sawerigading Law Journal*, 1(1), 40-54.

Gaol, S.L. 2019. Kedudukan dan Kekuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Sistem Pembuktian Berdasarkan Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10 (1) hal 87-117.

Ginting, S. 2020. Analisis yuridis terhadap kedudukan hukum perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang bersertifikat yang dibuat Di bawah tangan (STUDI PUTUSAN NO. 130/PDT. G/2012/PN. MLG). *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 3(1).

Hartanto, Andy. 2015. Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah. *LaksBang Justitia*, Surabaya.

Hayati, N. (2016). Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (suatu tinjauan terhadap perjanjian jual beli dalam konsep hukum barat dan hukum adat dalam kerangka hukum tanah nasional). *Lex Jurnalica*, 13(3), 147934.

Kurniawati, L. 2018. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 2(1), 1-18.

Lidiyana, M., & Rahayu, M. I. F. 2021. Keabsahan Jual Beli Atas Rumah Dengan Perjanjian Di Bawah Tangan yang Hendak Di Buatkan Akta Jual Beli Tanpa Adanya Pihak Penjual. *Recital Review*, 3(2), 158-174.

- Nugroho, F. A. (2019). Perlindungan hukum bagi pembeli terhadap jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara di bawah tangan (Studi Kasus Di Kota Malang) (*Doctoral dissertation, Brawijaya University*).
- Palit, R. C. 2015. Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. *Lex Privatum*, 3(2).
- Prasojo, E. C., & Anand, G. 2018. Akibat Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Obyek Hak Tanggungan Yang Dinyatakan Gugur Demi Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan. *Jurnal Selat*, 5(2), 148-160. 24
- Pulungan, M. T., & Muazzul, M. 2017. Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(2), 60- 71.
- Rajagukguk, J. P., Zuliah, A., & Dewi, A. T. 2021. Akibat Hukum Jual Beli Atas Tanah Dengan Sertifikat Hak Milik Dalam Akta Di Bawah Tangan. *Warta Dharmawangsa*, 15(2), 200- 208.
- Risma Dewi, Avina &Utari, Anak Agung Sri. 2015. Kekuatan Hukum dari sebuah akta dibawah tangan. *Jurnal Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar*, Vol. 3, No.3
- Sadewo, J. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta Di Bawah Tangan. *Sol Justicia*, 2(2), 188-200.
- Safriadi, Sakti, S. T. I., & Budhisulistiyawati, A. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 144-150.
- Satrianingsih, N. N. P., & Wirasila, A. N. 2019. Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(6).
- Setiawan, A. T., Kistiyah, S., & Laksamana, R. 2021. Problematika Keabsahan Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Tanah di Kawasan Transmigrasi. *Tunas Agraria*, 4(1), 22-39.
- Sudirman, H., & Zafrinal, Z. 2022. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SIAK. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, 13(1), 4-4.
- Sulisrudatin, N. 2014. Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Implementasi Hukum Agraria. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(2).

Utami, K. D. A. 2014. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Jual Beli Di Bawah Tangan (Kajian Terhadap Putusan Nomor: 1860K/Pdt/2005). *Arena Hukum*, 7(2), 287-302.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Perayuran Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

